

ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI

Nindi Puspita Sari¹; Etik Umiyati²; Nurhayani³

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Jln. Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

E-mail : puspitanindi315@gmail.com (Korespondensi)

Abstract: This study examines trends in regional expenditure, economic growth, unemployment, and poverty in Jambi Province during 2019–2024, as well as their influence on poverty levels. Using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and related institutions, the research applies descriptive quantitative and panel data regression analyses. The results indicate that regional expenditure has a significant negative effect on poverty, meaning that increased government spending contributes to poverty reduction. In contrast, economic growth does not significantly affect poverty, suggesting that the benefits of growth are not distributed evenly across society. Likewise, the unemployment rate shows no significant impact on poverty during the study period. Simultaneously, regional expenditure, economic growth, and unemployment significantly influence poverty levels. The Adjusted R² value of 97.8% indicates that these variables explain most variations in poverty. Therefore, local governments should optimize regional expenditure, particularly programs that directly improve community welfare and support poverty alleviation efforts.

Keywords: *regional expenditure, economic growth, unemployment rate, poverty level, Jambi Province*

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, struktural, dan politik. Kompleksitas tersebut menjadikan kemiskinan sebagai tantangan yang sulit diatasi karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat, distribusi pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat seluruhnya (Fikri et al., 2015). Masalah kemiskinan memiliki sifat yang rumit dan melibatkan banyak aspek. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan perlu dikerjakan secara holistik dan terintegrasi (Warni Yanti, 2024).

Di Indonesia, kemiskinan menjadi masalah serius yang masih terus dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi (Sinurat, 2023). Berbagai kebijakan telah

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan angka kemiskinan. Namun demikian, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tergolong tinggi. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selama periode 2019–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 7,60 persen, meningkat menjadi 8,09 persen pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, kemudian menurun secara bertahap menjadi 7,10 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, kesenjangan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota masih terlihat cukup signifikan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jambi erat kaitannya dengan

kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan belanja daerah. Belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting sebagai instrumen pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Halim (2014) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana aktivitas yang dinyatakan dalam bentuk finansial, mencakup perkiraan pengeluaran untuk suatu periode tertentu, serta rencana untuk memenuhi pengeluaran tersebut (Cenissa, Sajow Jenny & Wokas, 2017). Namun, Mardiasmo (2009) menjelaskan anggaran merupakan pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Sementara itu, Halim (2007) menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah yang efektif dan tepat sasaran diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan menurunkan tingkat kemiskinan (Sari et al., 2018).

Selain belanja daerah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan distribusi pendapatan sering kali menyebabkan hasil pembangunan belum dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Todaro dan Smith (2006) dalam (Rini, 2016) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap karakteristik masyarakat miskin sangat penting sebelum merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, sebuah perekonomian dapat dianggap mengalami pertumbuhan jika ada kenaikan output riil (Lamas, 2021). Akibat dari bertambahnya jumlah input serta cara pemanfaatan input yang lebih efisien. Mereka meyakini bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan jumlah input yang akan menimbulkan peningkatan dalam produksi (peningkatan efisiensi produksi) (Iqbal et al., 2020).

Di sisi lain, tingkat pengangguran juga memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Tingginya pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, mengurangi daya beli, serta meningkatkan risiko kemiskinan. Menurut Nugroho (2014), permasalahan pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan peningkatan angkatan kerja serta adanya faktor struktural berupa keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Inayati (2018) juga menjelaskan bahwa pengangguran berdampak negatif terhadap pemerataan pendapatan dan memperburuk kondisi kemiskinan. Meskipun ada tingkat pengangguran tertentu yang tak dapat dihindari dalam perekonomian yang kompleks dengan ribuan perusahaan dan jutaan pekerjaan, jumlah pengangguran bervariasi di berbagai waktu dan negara (Lestari, 2024). Tingkat pengangguran alami merujuk pada suatu kondisi di mana pengangguran terjadi secara alami dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya (Nugroho, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada tingkat regional. Selain itu, penelitian yang menganalisis ketiga variabel tersebut secara simultan di Provinsi Jambi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

METODE

Riset ini mengadopsi metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder time series periode 2019–2024. Fokus utamanya adalah menganalisis secara statistik bagaimana variabel anggaran daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran secara kolektif memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

HASIL

Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah alat yang sangat penting dalam realisasi pembangunan karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan, layanan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan jumlah anggaran belanja dari tahun ke tahun mencerminkan adanya dinamika keuangan daerah yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi, kebijakan pemerintah, transfer dana dari pusat ke daerah, serta prioritas pembangunan setiap wilayah.

Tabel 1 Anggaran Belanja Daerah

Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Daerah					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	1.408.461.29	1.229.591.234	1.226.594.369	1.124.957.41	1.259.465.99	1.227.598.60
Merangin	1.497.443.53	1.422.295.189	1.509.156.527	1.223.921.028	1.338.008.62	1.454.773.68
Sarolangun	1.433.000.521	1.221.823.151	1.198.038.773	1.177.755.45	1.260.650.47	1.343.058.90
Batang Hari	1.393.999.90	1.196.945.496	1.296.009.823	1.357.884.40	1.529.752.14	1.357.362.953
Muaro Jambi	1.382.424.42	1.391.582.517	1.392.250.190	1.364.700.48	1.455.760.85	1.633.641.31
Tanjung Jabung	1.225.249.82	1.095.361.651	1.155.512.766	1.180.072.80	1.178.681.96	1.260.455.32

g Timur						
Tanjung Jabung Barat	1.568.057.751	1.390.378.974	1.228.354.538	1.580.800.630	1.750.004.102	2.068.209.215
Tebo	1.157.330.855	1.021.783.331	1.103.676.777	1.338.826.262	1.223.970.584	1.246.736.394
Bungo	1.616.706.122	1.294.680.573	1.513.269.911	1.218.269.457	1.391.365.063	1.466.025.032
Kota Jambi	1.710.612.143	1.667.715.470	2.073.287.529	1.620.887.375	1.720.255.457	1.800.252.368
Kota Sungai Penuh	868.042.890	711.305.688	812.837.378	792.958.912	788.700.597	810.277.392
Jambi	15.261.328.378	4.430.392.751	4.516.148.844	13.981.035.518	14.896.616.205	15.668.380.436

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum meninjau informasi pada Perkembangan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi ekonomi yang selalu berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, situasi pasar, sektor unggulan lokal, serta keadaan ekonomi baik nasional maupun internasional. Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak besar terhadap perlambatan bahkan penurunan ekonomi di beberapa daerah. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi ekonomi yang selalu berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, situasi pasar, sektor unggulan lokal, serta keadaan ekonomi baik nasional maupun internasional. Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak besar terhadap perlambatan bahkan penurunan ekonomi di beberapa daerah. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan data mengenai

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024.

Tabel 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kerinci	5.02	3.69	4.16	4.43	5.82	4.48
Kabupaten Merangin	4.82	0.78	5.09	5.72	5.33	4.75
Kabupaten Sarolangun	5.08	-0.26	6.61	6.73	4.27	3.72
Kabupaten Batang Hari	4.99	-0.27	4.74	12.2	3.98	3.42
Kabupaten Muaro Jambi	5.06	0.27	4.08	8.05	5.97	6.33
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.25	-0.87	0.13	0.57	2.49	4.68
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5.15	-0.64	1.36	2.57	3.68	4.43
Kabupaten Tebo	4.78	-0.04	4.32	6.29	4.68	4.15
Kabupaten Bungo	4.35	-0.4	5.12	4.73	5.09	3.36
Kota Jambi	5.33	-0.28	3.94	5.37	6.37	4.88
Kota Sungai Penuh'	5.12	-0.14	3.67	4.43	4.92	5.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data mengenai pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi antara tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa hampir semua kabupaten dan kota mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Situasi ini ditunjukkan oleh banyaknya nilai pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan menjadi negatif, yang menunjukkan adanya pengaruh besar dari pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Penurunan ini terjadi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, dan industri yang melambat akibat pembatasan aktivitas masyarakat.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, sebagian besar wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang cukup

baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kembali angka pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh daerah, bahkan beberapa wilayah mengalami kenaikan yang signifikan seperti Kabupaten Batang Hari yang mencapai 12,26 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan adanya percepatan dalam pemulihan ekonomi yang didorong oleh kembalinya aktivitas sektor-sektor produktif serta peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota tampak cukup stabil meskipun tidak setinggi periode pemulihan sebelumnya. Beberapa daerah seperti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan daerah lain, mencerminkan peran pusat ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lebih dominan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi di Provinsi Jambi telah mulai bangkit kembali pasca pandemi, meskipun masih terdapat variasi dalam kinerja antar wilayah.

Tabel 3 Tingkat Pengangguran

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	2,62	2,43	2,32	2,63	2,48	2,51
Merangin	3,68	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
Sarolangun	4,09	5,71	5,52	5,22	5,09	5,03
Batang Hari	4,56	4,42	4,26	3,53	3,85	4,49
Muaro Jambi	5,20	5,43	5,59	5,35	5,40	5,27
Tanjung Jabung Timur	1,63	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06
Tanjung Jabung Barat	2,57	2,16	2,53	2,88	2,95	3,20
Tebo	2,90	2,95	2,83	1,38	1,71	2,50
Bungo	3,82	5,94	5,86	5,50	5,23	4,46
Kota Jambi	6,53	10,49	10,66	8,95	8,27	7,38

Kota Sungai Penuh	4,0 0	5,5 6	3,0 0	2,4 9	3,8 0	4,3 0
Jambi	4,0 6	5,1 3	5,0 9	4,5 9	4,5 3	4,4 8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data tentang tingkat pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jambi selama periode 2019 hingga 2024, secara umum dapat dilihat bahwa situasi pengangguran bervariasi di setiap kawasan dengan pola yang berbeda. Pada tahun 2020, hampir semua kabupaten dan kota mengalami lonjakan tingkat pengangguran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini mencerminkan efek dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi peluang kerja di banyak sektor.

Masuk ke tahun 2021 dan 2022, beberapa wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan, terlihat dari penurunan angka pengangguran, seperti yang terjadi di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo yang mengalami penurunan signifikan. Hal ini menandakan adanya proses pemulihan ekonomi yang mulai berdampak positif pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal dalam masing-masing wilayah.

Namun, antara tahun 2023 dan 2024, perkembangan tingkat pengangguran masih terlihat bervariasi. Beberapa kawasan seperti Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo menunjukkan penurunan, sedangkan daerah lain seperti Kota Jambi masih menghadapi tingkat pengangguran yang tergolong tinggi meskipun menunjukkan penurunan dibandingkan dengan puncak pada tahun 2020. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jambi masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan struktur ekonomi antarwilayah serta kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Tabel 4 Tingkat Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	7,1 3	7,3 0	7,7 1	7,5 7	7,5 4	6,9 3
Merangin	8,4 8	8,6 3	9,1 1	8,7 0	8,9 0	8,4 0
Sarolangun	8,4 5	8,4 2	8,8 7	8,4 8	8,5 4	8,3 6
Batang Hari	9,7 5	9,6 5	10, 05	9,6 3	9,4 5	8,6 3
Muaro Jambi	3,8 3	3,8 3	4,5 3	4,4 7	4,4 3	3,6 5
Tanjung Jabung Timur	11, 54	10, 95	11, 39	10, 91	10, 85	10, 14
Tanjung Jabung Barat	10, 56	10, 29	10, 75	10, 00	9,7 9	9,5 4
Tebo	6,4 7	6,2 6	6,6 8	6,3 4	6,4 6	6,1 2
Bungo	5,6 0	5,8 0	6,2 3	5,3 8	5,2 9	5,0 6
Kota Jambi	8,1 2	8,2 7	9,0 2	8,3 3	8,2 4	7,7 3
Kota Sungai Penuh	2,8 1	3,0 3	3,4 1	2,9 7	3,0 0	2,9 2
Provinsi Jambi	7,6 0	7,5 8	8,0 9	7,6 2	7,5 8	7,1 0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data mengenai tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga 2024, umumnya terlihat bahwa tingkat kemiskinan di banyak daerah mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2020 dan 2021, sejumlah kabupaten/kota mencatatkan kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh merosotnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat serta terbatasnya aktivitas ekonomi.

Memasuki periode 2022 hingga 2024, mayoritas daerah menunjukkan perbaikan yang terlihat dari penurunan secara bertahap pada tingkat kemiskinan. Hal ini menandakan adanya proses pemulihan ekonomi yang mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah, seperti

Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan penurunan yang cukup konsisten, meskipun mereka masih berada dalam kategori kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi masih terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan tingkat terendah ada di Kota Sungai Penuh. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya di wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Pengujian spesifikasi model untuk menentukan model dalam regresi data panel terdiri dari tiga jenis pengujian, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji langrage multiplier.

Tabel 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	195.945315	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	241.254353	10	0.0000

Sumber : Eviews 12 (2026) Data Diolah

Berdasarkan analisis Redundant Fixed Effects Tests pada persamaan yang diterapkan, nilai Cross-section F yang diperoleh adalah 195,945315 dengan derajat kebebasan (10,52) dan probabilitas sebesar 0,0000. Selain itu, uji Cross-section Chi-square menghasilkan nilai 241,254353 dengan derajat kebebasan 10 dan probabilitas 0,0000.

Tabel 6 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.074969	3	0.0179

Sumber : Eviews 12 (2026) Data Diolah

Tabel 7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided			
(all others) alternatives			
Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	92.06927 (0.0000)	0.100801 (0.7509)	92.17007 (0.0000)
Honda	9.595273 (0.0000)	0.317491 (0.6246)	6.560382 (0.0000)
King-Wu	9.595273 (0.0000)	0.317491 (0.6246)	5.280603 (0.0000)
Standardized Honda	11.22563 (0.0000)	0.127360 (0.4493)	4.903216 (0.0000)
Standardized King-Wu	11.22563 (0.0000)	0.127360 (0.4493)	3.534892 (0.0002)
Gourieroux, et al.	--	--	92.06927 (0.0000)

Sumber: Eviews 12 (2026) Data Diolah

Hasil uji Hausman yang tersaji pada tabel *Correlated Random Effects*, diperoleh nilai statistik *Chi-Square* sebesar 10,074969 dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar 3. Nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,0179, yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,0179 < 0,05$). Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan tersebut, hipotesis nol (H_0) ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara error term dengan variabel independen, sehingga penggunaan FEM lebih mampu menangkap karakteristik spesifik antar unit *cross-section* dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah FEM.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Uji Multikolinearitas

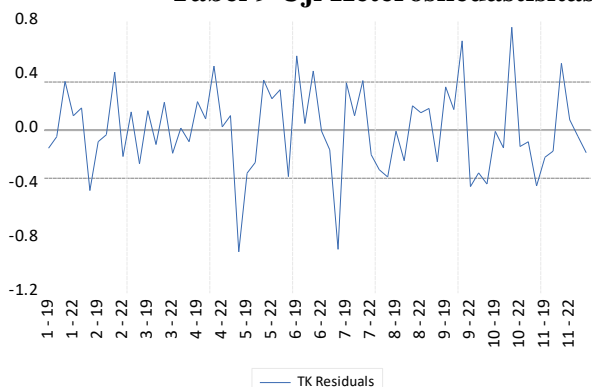
	ABD	PE	TP
ABD	1.000000	0.138209	0.453127
PE	0.138209	1.000000	0.033682
TP	0.453127	0.033682	1.000000

Sumber: Eviews 12 (2026) Data Diolah

Koefisien korelasi ABD dan PE sebesar $0,138209 < 0,85$, ABD dan TP sebesar $0,453127 < 0,85$, dan PE dan TP sebesar $0,0366019 < 0,85$. Maka disimpulkan bahwa terbebas multikolinariatas atau lolos uji multikolinariatas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Eviews 12 (1016) Data Diolah

Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh karena itu, tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji t

Tabel 10 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.994827	0.557011	14.35309	0.0000
ABD	-7.52E-10	3.68E-10	-2.040861	0.0464
PE	0.020324	0.020385	0.997034	0.3234
TP	0.104722	0.069264	1.511939	0.1366

Sumber: Eviews 12 (2026) Data Diolah

Variabel ABD (Anggaran Belanja Negara) memiliki nilai t-statistik sebesar -2.040 dengan nilai prob.(signifikansi) sebesar 0.0464 (< 0.10) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel ABD berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (TK).

Variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki nilai t-statistik sebesar 0.997 dengan

nilai prob.(signifikansi) sebesar 0.3234 (> 0.10) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel PE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (TK).

Variabel TP (Tingkat Pengangguran) memiliki nilai t-statistik sebesar 1.511 dengan nilai prob.(signifikansi) sebesar 0.1366 (> 0.10) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel TP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (TK).

Hasil Uji F

Tabel 11 Uji F

R-squared	0.982949
Adjusted R-squared	0.978686
S.E. of regression	0.354667
Sum squared resid	6.540993
Log likelihood	-17.36827
F-statistic	230.5836
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 12 (2026) Data Diolah

Diketahui nilai F-satistik sebesar 230.5836 dengan nilai prob. (F-statistik) sebesar 0,000000 (< 0.05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Diketahui nilai Adjusted R Squared sebesar 0,978686 maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan). sebesar 97,8%. Sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi

Hasil estimasi dari model regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Anggaran Belanja Daerah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, dengan koefisien sebesar -7. 52E-10 dan probabilitas sebesar 0. 0464. Probabilitas yang berada di bawah 0. 05

menandakan bahwa Anggaran Belanja Daerah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien negatif mengindikasikan adanya hubungan terbalik, yaitu ketika Anggaran Belanja Daerah meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran dari pemerintah daerah berpotensi memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif ini terjadi karena anggaran belanja daerah dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan belanja daerah dapat memperbesar peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperbaiki kualitas layanan publik. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan tingkat kemiskinan menurun. Oleh karena itu, optimalisasi Anggaran Belanja Daerah menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fasholla (2018) yang mengungkapkan bahwa belanja daerah memengaruhi tingkat kemiskinan (Raranta et al., 2023).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi

Hasil estimasi dari model regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi mungkin disebabkan oleh nilai t-statistik sebesar 0.997.034 dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0.3234 (> 0.10). Angka ini mengindikasikan bahwa secara statistik, Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan dan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kemiskinan. Situasi ini mungkin terjadi karena pertumbuhan ekonomi

yang berlangsung belum sepenuhnya bersifat inklusif, sehingga peningkatan output ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, relasi yang ditemukan adalah negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Saat ekonomi berkembang, jumlah lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bertambah.

Namun, dalam praktiknya, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Apabila pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kelompok, maka pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi kurang signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Endrawati et al., 2023) pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan juga sejalan dengan (Putri, 2026) kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin tidak mengalami dampak yang berarti.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi

Hasil estimasi dari model regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran (TP) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1.511.939 dengan nilai probabilitas (signifikansi) yang tercatat 0.1366 (> 0.10), yang mengindikasikan

bahwa variabel TP tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Kemiskinan (TK). Ketidakberartian ini mencerminkan bahwa fluktuasi tingkat pengangguran belum dapat memberikan efek yang jelas terhadap perubahan dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak semua individu yang menganggur berada dalam garis kemiskinan; contohnya, ada pengangguran yang masih mendapatkan dukungan finansial dari keluarga atau sumber lain.

Di samping itu, kurangnya pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan juga bisa disebabkan oleh adanya sektor informal yang cukup luas di masyarakat. Banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pegawai formal tetapi tetap aktif secara ekonomi, seperti menjalankan usaha kecil atau pekerjaan lepas, sehingga tetap memperoleh penghasilan meskipun mereka statusnya adalah penganggur. Situasi ini menyebabkan hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menjadi tidak terlalu kuat, sehingga secara statistik tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hasibuan, 2023) penelitian ini mengindikasikan bahwa pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan juga sejalan dengan (Mukhtar et al., 2019) menunjukkan adanya hubungan yang merugikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data serta pembahasan mengenai dampak Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi selama tahun 2019-2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan hubungan yang negatif. Ini berarti bahwa

semakin tinggi alokasi belanja daerah, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah yang terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga tidak dapat mengurangi angka kemiskinan secara nyata.
- 3) Tingkat pengangguran juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti bahwa fluktuasi tingkat pengangguran tidak memiliki dampak langsung terhadap perubahan kemiskinan selama periode analisis.
- 4) Secara keseluruhan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang terbukti dari nilai probabilitas uji F yang signifikan.
- 5) Nilai Adjusted R² sebesar 97,8% menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran sangat mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan, sementara 2,2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Cenissa, Sajow Jenny, M., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. 5(2), 2303–1174.
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks

- Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia. 7(3), 20144–20151.
- Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). Perencanaan pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di indonesia. 8(1).
- Iqbal, M., Firdaus, M., Juanda, B., & Hakim, D. B. (2020). Impact Of Economic Growth On Regional Development In Jambi Province. 7(4), 405–420.
- Lamas, L. (2021). Pengaruh Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Jambi.
- Lestari, S. A. (2024). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak), upah dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di provinsi jambi.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis Of The Effects Human Development Index And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia. 2(2), 77–89.
- Nugroho, R. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998-2014. X(2), 177–191.
- Putri, G. A. (2026). Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Pemulihan Kemiskinan : Analisis Empiris di Indonesia Pasca-Krisis. 6(1), 56–71.
- Raranta, M. L., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. 23(7), 37–48.
- Rini, A. S. (2016). Determining Factors Of Poverty In Indonesia: Household Analysis. 1(2), 80–95. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252>
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. 15(1), 38–43.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. 5(2), 87–103.
- Warni Yanti, M. R. & N. (2024). The Effect Of Macro Developmwnt Variables On Poverty Rate Through Economic Growth Of Jambi Province. 5(1), 72–87